



**PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**

**ATAS**

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

**TAHUN ANGGARAN 2019**

**Mamuju, Kamis (25/06)** – Anggota VI BPK RI / Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI, **Prof. Harry Azhar Azis, M.A., Ph.D., CSFA** menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran (TA) 2019 melalui Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, **Muhamad Toha Arafat, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA** dalam acara Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada hari ini (25/06) di Mamuju.

Pemeriksaan atas LKPD merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK, dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan, pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan LHP kepada DPRD dan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

Mengawali sambutan yang disampaikan secara virtual melalui *video conference*, Harry Azhar Azis menyampaikan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD dengan memerhatikan empat hal yaitu (1) kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; (2) kecukupan informasi laporan keuangan; (3) efektifitas Sistem Pengendalian Intern; dan (4) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Provinsi Sulawesi Barat TA 2019, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah berhasil mempertahankan Opini WTP untuk yang keenam kalinya

**Informasi lebih lanjut:**  
Kepala Sekretariat, Asih Waryanti  
Telp. (0426) 2322969 ext. 204/206

<https://www.mamuju.bpk.go.id>



secara berturut-turut sejak TA 2014. Namun demikian, BPK masih menemukan permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, antara lain Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum sepenuhnya tertib dan Pengelolaan Dana BOS belum sepenuhnya memadai. “Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun opininya sudah WTP, namun tetap dibutuhkan perbaikan tata kelola dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat” jelas Harry Azhar Azis.

Lebih lanjut, Harry Azhar Azis menyampaikan agar Gubernur Sulawesi Barat beserta jajarannya untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima sesuai dengan pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 dan 2020, beberapa indikator kesejahteraan menunjukkan kecenderungan peningkatan tren seperti (1) ekonomi Sulawesi Barat pada triwulan I tahun 2020 tumbuh 4,92%, lebih tinggi dari nasional sebesar 2,97%; (2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2019 di Sulawesi Barat sebesar 3,18%, lebih rendah dari nasional sebesar 5,28%; (3) tingkat kemiskinan di Sulawesi Barat tahun 2019 sebesar 10,95%, lebih tinggi dari nasional yang hanya satu digit (9,22%); (4) tahun 2019, *Gini Ratio* di Sulawesi Barat sebesar 0,365, lebih rendah dibandingkan nasional (0,382); (5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Barat pada tahun 2019 sebesar 65,73, lebih rendah daripada capaian nasional 71,92; dan (6) tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Mei) 2020 di Sulawesi Barat sebesar 1.73% pada periode yang sama, persentase tersebut menunjukkan lebih tinggi dari nasional 0,90%. “kami berharap pada tahun 2020 ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mampu menekan tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan laju inflasi” jelasnya.

Di akhir sambutannya, Harry Azhar Azis mengingatkan bahwa pencapaian Opini WTP yang telah dipertahankan enam kali berturut-turut akan sia-sia jika tidak diikuti dengan kesejahteraan rakyat di Provinsi Sulawesi Barat.